



Media: Harian Jogja

Hari: Sabtu

Tanggal: 01 April 2017

Halaman: 13

► PENATAAN KOTA

Juru Parkir

Diusulkan Digaji

UMBULHARJO-
Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah
(DPRD) Kota Jogja
mewacanakan semua
juru parkir (Jukir)
digaji.

Ujang Hasanudin
hasanudin@harianjogja.com

Dana untuk menggaji diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sistem parkir berlangganan. Hal itu untuk menekan kebocoran pendapatan daerah dari sektor parkir dan meminimalisasi jukir nakal.

Wacana ini segera dibahas dalam Rapat Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran. "Jika masih ditemukan petugas parkir yang *nuthuk* harga Pemerintah Kota Jogja bisa langsung menindak tegas dengan pemecatan," kata Ketua Pansus Perparkiran, Antonius Fokki Ardiyanto, Jumat (31/3).

Fokki mengaku wacananya tersebut dari hasil studi banding di Kota Batam selama tiga hari lalu. Menurut dia, Batam mulai tahun ini menerapkan sistem gaji petugas parkir dari APBD dan parkir berlangganan. Dengan sistem tersebut, kata Fokki, Batam berani menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir sebesar Rp30 miliar. Padahal 2016 PAD-nya hanya Rp3,5 miliar.

Ia menilai sistem tersebut cukup efektif dan bisa diterapkan di Kota Jogja. Menurutnya, Jogja sebagai kota wisata terkadang tercoreng dengan ulah jukir yang menaikkan tarif parkir di luar ketentuan.

Wacana menggaji jukir segera dibahas dalam Rapat Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran.

Jogja sebagai kota wisata terkadang tercoreng dengan ulah jukir yang menaikkan tarif parkir di luar ketentuan.

dengan ulah jukir yang menaikkan tarif parkir di luar ketentuan atau *nuthuk* harga terutama saat musim liburan.

Dalam waktu dekat, Pansus Perparkiran akan berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyusun regulasinya dan kepolisian untuk mensinergikan langganan parkir melalui pajak kendaraan tahunan. "Ini akan menjadi kajian serius kami dalam konteks bagaimana kalau diterapkan di Jogja," ujar Fokki.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini menambahkan, dengan sistem gaji jukir dari APBD dan sistem langganan, penyelenggara parkir juga bisa bekerja sama dengan perusahaan asuransi untuk mengganti 100% jika terjadi kehilangan kendaraan di lokasi parkir.

Adapun, Kepala Dinas Perhubungan Kota Jogja, Wirawan Hario Yudo menyambut baik usulan Dewan. Namun, menurutnya perlu ada kajian mendalam dan penyesuaian dengan APBD Kota Jogja.

Perda No 19/2009
Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Tarif Parkir di Tepi Jalan Umum

Jenis Kendaraan	Kawasan I	Kawasan II
1. Truk gandengan, sumbu III atau lebih	30.000	20.000
2. Truk Besar	20.000	15.000
3. Bus Besar	20.000	15.000
4. Truk sedang/Box	15.000	10.000
5. Bus sedang	15.000	10.000
6. Sedan, Jeep, Pickup, Station Wagon/Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga	2.000	1.500
7. Sepeda Motor	1.000	500
8. Sepeda Listrik	500	500
9. Sepeda	200	200

Ia mengakui sistem parkir saat ini masih banyak kekurangan dan perlu penyesuaian. Selama ini perparkiran melalui sistem kerja sama antara Dinas Perhubungan dan pengelola parkir. "Persentase keuntungan parkir memang diperoleh lebih banyak ke petugas parkir," kata Wirawan.

Dalam catatannya, pendapatan daerah dari parkir yang dikelola Dinas Perhubungan pada 2016 lalu sebesar Rp1,6 miliar. Pendapatan itu dari 900 petugas parkir baik parkir di tepi jalan umum (TJU) maupun tempat khusus parkir (TKP).

Tindak Lanjut

☐ Untuk Ditangkas

☐ Untuk Diketahui

☐ Jemput Pers

.....
pala
aris

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005